



**ANALISIS EFEKTIVITAS PAD, EFESIENSI KEUANGAN
DAERAH, RASIO KESERASIAN, RASIO PERTUMBUHAN
DAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK PENILAIAN KINERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN
DAIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Monika Sales
1915100100

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS PAD, EFESIENSI KEUANGAN DAERAH, RASIO KESERASIAN, RASIO PERTUMBUHAN DAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENILAIAN KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI

NAMA : MONIKA SALES
N.P.M : 1915100100
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 30 Maret 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Irawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Dr Agus Tripryono, S.E., M.Si., Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MONIKA SALES
Npm : 1915100100
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS /AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS EFEKTIVITAS PAD, EFESIENSI
KEUANGAN DAERAH, RASIO KESERASIAN,
RASIO PERTUMBUHAN, DAN RASIO
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
UNTUK PENILAIAN KINERJA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 07 Mei 2024




Monika Sales
NPM: 1915100100

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monika Sales
NPM : 1915100100
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Sosial Sains
Jenjang : Strata-1 (S-1)
Alamat : Sipoltong, Kec.Siempat Nempu Hulu Kab.Dairi
No. HP/WA : 082272429356

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehubungan dengan hal tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 07 Mei 2024

Penulis,



Monika Sales

NPM.1915100100

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat penilaian kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan rasio keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu rasio keuangan seperti, efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi kurang efektif dalam menjalankan amanahnya. Hal ini menunjukkan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum mencapai tingkat yang efektif. Efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi masih belum efektif dan dapat dikatakan tingkat pencapaian nilai kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi belum optimal dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya modal. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian PAD yang berfluktuasi setiap tahunnya. Rasio keserasian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih belum optimal dalam memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini terlihat dari belanja aparatur pemerintah yang mendominasi belanja pembangunan daerah. Laju pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum menunjukkan status yang cukup baik dan positif. Hal ini menunjukkan nilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih belum berjalan maksimal. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Dairi baik dan cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan amanah pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Faktor-faktor lain yang dikatakan dapat mempengaruhi nilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi adalah pendapatan daerah, belanja daerah, keuangan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi daerah.

Kata Kunci: Penilaian Kinerja Pemerintah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

The aim of this research is to assess regional government performance using financial ratios in the Dairi Regency Regional Government. This research is quantitative descriptive research by describing the data collected. This research was conducted at the Regional Government of Dairi Regency. The data collection techniques used in this research are observation and documentation. The data analysis technique used is financial ratios such as PAD effectiveness, regional financial efficiency, harmony ratio, growth ratio and regional financial independence ratio. The results of this research show that the level of effectiveness of the Dairi Regency Regional Government's PAD is less effective in carrying out its mandate. This shows that the assessment of the performance of the Dairi Regency Regional Government has not yet reached an effective level. The regional financial efficiency of the Dairi Regency Government is still not effective and it can be said that the level of achievement of the Dairi Regency Government's performance values is not yet optimal in terms of efficient use of capital resources. This is realized by the achievement of PAD which fluctuates every year. The harmony ratio of the Regional Government of Dairi Regency is still not optimal in prioritizing the allocation of funds for routine expenditure and development expenditure. This can be seen from government apparatus spending which dominates regional development spending. The growth rate of the Regional Government of Dairi Regency has not shown a fairly good and positive status. This shows that the performance of the Regional Government of Dairi Regency is still not running optimally. The level of independence of the Dairi Regency regional government is good and quite independent in meeting financial needs to carry out government mandates, development and community social services. Other factors that are said to influence the performance value of the Dairi Regency Regional Government are regional income, regional expenditure, regional finances, human resources and regional macroeconomic conditions.

Keywords: *Effectiveness PAD Ratio, Efficiency Financial Performance Ratio, Harmony Ratio, Growth Ratio, and Independence Financial Performance Ratio,*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanna Waa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Analisis Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Dairi”**.

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

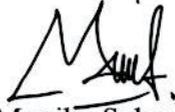
Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E Rusiadi, SE., MSi selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., MSi selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Irawan, SE., MSi selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.

5. Bapak Dr. Agus Tripriyono, SE., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak memberikan masukan di dalam perbaikan skripsi Seluruh dosen dan pegawai Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kedua orang tua Penulis, Bapak dan Ibu, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesebarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis Berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan
7. Bapak Dr.Deddy DP.Situmorang,SE, M.Si selaku Kepala Dinas dan Bapak Rayambong S.Sitohang, ST, M.AP selaku Sekretaris dan Sondang E.Matondang, A.Md selaku Bendahara saya yang sudah begitu baik memberikan waktu dan kesempatan selama saya mengikuti perkuliahan
8. Seluruh Teman-teman Penulis di UNPAB angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan Motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, 07 Mei 2024


Monika Sales
NPM: 1915100100

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Konseptual	29
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3 Populasi dan Sampel.....	32
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	33
3.4.1 Variabel Penelitian	33
3.4.2 Definisi Operasional.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan.....	40
4.1.2 APBD Pemerintah Kabupaten Dairi.....	42
4.1.3 Analisis Efektivitas PAD.....	43
4.1.4 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah.....	45
4.1.5 Analisis Rasio Kesenjangan.....	46

4.1.6 Analisis Rasio Pertumbuhan.....	48
4.1.7 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	50
4.2 Pembahasan	52
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	59
5.1 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Dairi	3
Tabel 1.2 Pendapatan Wilayah Kabupaten Diri	4
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian.....	24
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas	25
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi.....	25
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Rasio Keserasian.....	27
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 APBD Pemerintah Kabupaten Dairi	42
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas PAD Tahun 2018-2022	43
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Efisiensi Tahun 2018-2022.....	45
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Tahun 2018-2022.....	46
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Tahun 2018-2022.	49
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Tahun 2018-2022.	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	30

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prinsip otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan pembangunan daerah yang juga termasuk bagian dari pembangunan nasional. Otoritas dan kewajiban daerah dalam melaksanakan kepentingan masyarakatnya didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban, keterbukaan dan partisipasi. Alasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yakni untuk membenahi dan memperbaharui kinerja pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan memiliki otoritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta pengelolaan keuangan daerah yang memegang kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang mencakup segala kegiatan yang melibatkan pelaporan, penatausahaan, penerimaan, dan pelaksanaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan kinerja setiap instansi pemerintah daerah menjadi perhatian karena mengatur segala perencanaan aktivitas pemerintah dalam satu periode. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah.

Perkembangan kinerja pemerintah dalam meraih wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dipengaruhi oleh prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah tidak dapat merealisasikan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa dana yang memadai dalam mewujudkan pelayanan,

pembangunan dan menjadi dasar tolak ukur dalam melihat secara *real* kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri yang mampu mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016). Kinerja keuangan merupakan pencapaian hasil kerja dalam bidang keuangan yang mencakup pemasukan dan belanja daerah yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mengurus dan mengontrol finansialnya serta memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pembangunan sangat penting dilaksanakan secara berkala melalui suguhan data statistik yang berkualitas.

Merujuk pada fakta kinerja pemerintah daerah di Indonesia masih terbilang buruk dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah, sesuai dengan pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), maka tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dalam instansi pemerintah pengukuran kinerja tidak diukur dengan rasio yang umumnya didapatkan dari sebuah laporan keuangan, karena dalam instansi pemerintah tidak berorientasikan laba (*net profit*). Penilaian kinerja keuangan dapat menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan sangat diperlukan untuk dilaksanakan dalam strategi dan rencana pengelolaan keuangan daerah agar terciptanya laporan keuangan yang bersifat demokratis, akuntabel, jujur, dan terbuka, serta mampu mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi alternatif masyarakat dalam mengawasi

kinerja pemerintah melalui laporan keuangan yang telah dihasilkan. Salah satu instrumen untuk menganalisis kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan analisis pendekatan rasio keuangan terhadap APBD yang terdiri dari lima jenis rasio yakni : rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan badan daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki potensi PAD yang cukup kecil dikarenakan wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dengan adanya sistem desentralisasi Kabupaten Dairi harus mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Berikut adalah gambaran APBD Pemerintah Kabupaten Dairi selama lima tahun anggaran:

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Dairi

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Kinerja Keuangan
2018	65.844.330.338,63	68.003.241.760,34	Sangat Efektif
2019	123.494.508.015,00	128.489.751.332,00	Sangat Efektif
2020	98.882.460.926,00	73.906.829.603,45	Kurang Efektif
2021	86.180.966.000,00	74.360.339.717,75	Cukup Efektif
2022	86.927.335.000,00	89.758.997.873,48	Sangat Efektif

Sumber: Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi selama lima tahun terakhir (2018-2022) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 menunjukkan anggaran dan realisasi PAD yang

kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan sektor ekonomi menjadi turun dan kegiatan pemerintahan menjadi terhambat. Selain itu, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi masih belum efektif dalam melakukan perhitungan rasio sebagai pengukur kinerja keuangan pemerintah.

Tabel 1.2 Penghasilan Wilayah Pemerintah Kabupaten Dairi

Tahun	Penghasilan Asli Wilayah	Penghasilan Wilayah	Kinerja Keuangan
2018	68.003.241.760,34	1.062.706.591.682,24	Rendah Sekali
2019	128.489.751.332,00	1.386.843.211.560,00	Rendah Sekali
2020	73.906,829.603,45	1.080.878.465.095,45	Rendah Sekali
2021	74.360.339.717,75	1.167.522.159.074,00	Rendah Sekali
2022	89.758.997.873,48	1.054.862.116.417,00	Rendah Sekali

Sumber: Informasi Finansial Pemerintah Kabupaten Dairi (2023)

Sesuai pada tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa penghasilan wilayah Kabupaten Dairi masih tergolong sangat rendah. Rendahnya PAD Kabupaten Dairi disebabkan keran pajak daerah yang juga rendah. Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, menurunnya daya beli masyarakat dan program pemerintah yang belum berjalan maksimal.

Tidak hanya itu, diketahui bahwa, belanja rutin (operasi) Kabupaten Dairi masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (Pembangunan). Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerahnya.

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan

pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah dari Pempus. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa Pinjaman Daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari pajak dan Retribusi Daerah, BUMD dan lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian, **“Analisis Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Dairi”**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalahan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi cenderung fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena belum efektifnya perhitungan rasio kinerja keuangan pemerintah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan program pemerintah yang belum berjalan maksimal, mengindikasikan rendahnya PAD yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
3. Kecondongan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi pada pengeluaran rutin untuk aktivitas, mengindikasikan belum tercapainya pembiayaan pembangunan daerahnya.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini nantinya akan membahas penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi. Agar tidak adanya penyimpangan keluar jalur pembahasan maka penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Adapun pembatasan data penelitian ini yaitu, dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendaotan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2018 sampai dengan 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dilihat dari efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan kemandirian keuangan daerah?

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan nilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian kinerja Kabupaten Daerah Dairi dilihat dari efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan nilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini nantinya diantaranya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menjadi bahan evaluasi wawasan bagi perkembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan penilaian kinerja daerah dilihat dari sisi rasio keuangan yang digunakan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam menerapkan pembelajaran yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan dengan dunia kerja nyata. Selain itu dapat mengetahui lebih dalam lagi tentang penilaian kinerja yang dilihat dari rasio keuangan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Dairi

Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi bagi pemerintahan terkait masalah kinerja keuangan yang dihadapi serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baru dalam pemerintahan.

3. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi lebih lanjut dalam pengembangan penelitian terutama terkait dengan analisis penilaian kinerja pemerintah dengan menggunakan rasio keuangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Pengembangan dalam penelitian ini didapati dengan melihat penelitian sebelumnya dan kemudian penulis melakukan replikasi dari penelitian Sri Wahyuni Apriyati Gea tahun 2022 dengan judul penelitian “Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan APBD Periode Tahun 2015-2020. Kemudian penelitian ini dikembangkan kembali dengan judul, “Analisis Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Dairi”.

Adapun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. **Model Penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini juga menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio keuangan.
2. **Variabel Penelitian:** penelitian sebelumnya menggunakan 5 rasio keuangan daerah (rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi), sedangkan penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan daerah (efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah).
3. **Jumlah observasi/sampel (n):** Penelitian terdahulu menganalisis laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2015-2020. Sedangkan penelitian ini menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi periode 2018-2022.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2022 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2023.
5. **Lokasi Penelitian:** penelitian sebelumnya dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Sitoli, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Stakeholder dalam institusi pemerintahan memiliki pengaruh besar dalam berjalannya sebuah kebijakan. *Stakeholder* lebih sering disebut dengan pemangku kepentingan. *Stakeholder* dapat diartikan secara lebih umum sebagai pihak-pihak yang terkait yang mempunyai perhatian dan kepentingan terhadap suatu program atau kegiatan. Brysson (2016) mengartikan stakeholder yaitu individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil (*output*) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut. Munculnya istilah stakeholder pertama kali diawali oleh *Standorf Research Institute* (RSI) pada tahun 1963 yang dilakukan oleh peneliti bernama Freeman (1984) ia mengembangkan eksposisi teoritis mengenai pemaknaan stakeholder pada tahun 1984 dalam karyanya “*Strategic Management A Stakeholder Approach*”. Selanjutnya, mengutip kutipan dari Freeman (1984) yang mengatakan stakeholder merupakan “*Any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective*”. *Stakeholder* merupakan sekelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi oleh proses pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi.

Hubungan mengenai *stakeholder* pada proses kebijakan publik membuktikan bahwa dalam pengambilan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari adanya keterlibatan *stakeholder* yang ada didalam kebijakan publik itu sendiri.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Lattimore et.al (2016) yang menyatakan adanya *stakeholder* memiliki konsekuensi satu dengan yang lain, dimana organisasi dapat menciptakan masalah dan kesempatan satu sama lain. Brysson mengemukakan (2016) analisis peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dimulai dengan menyusun stakeholder pada matriks dua kali dua menurut *interest* (kepentingan) *stakeholder* terhadap suatu masalah dan *power* (kekuasaan) *stakeholder* dalam mempengaruhi masalah tersebut. *Interest* adalah kepentingan yang dimiliki stakeholder dalam pembuatan kebijakan, sedangkan yang dimaksud dengan *power* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan.

Brysson mengemukakan ada beberapa matriks yang berperan dalam kebijakan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Contest setter* yaitu *stakeholder* yang berpengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan tetapi sedikit kepentingan. sehingga mereka memiliki risiko yang signifikan untuk harus dipantau dalam proses pelaksanaan kebijakan.
- 2) *Players* yaitu *stakeholder* yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. *Stakeholder* ini mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu program kebijakan.
- 3) *Subject* yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuasaan yang rendah. Walaupun mereka mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada. *Stakeholder* ini dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya.

4) *Crowd* yaitu *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun *stakeholder* ini memiliki pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan. Kepentingan dan pengaruh yang dimiliki akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dari pelaksana kebijakan.

2.1.2 Kinerja

a. Definisi Kinerja

Menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengertian Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian kinerja, sebagai berikut:

Menurut Mahsun (2014), “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”. Dalam hubungannya dengan Kinerja Keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Desi (2013) dalam jurnalnya, “Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD”. Menurut Halim (2017), “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak (Putri, 2015).

Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah (Harahap, 2019).

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah menurut Putri (2015) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Nurlia (2017) bahwa, “Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk tiga tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah
- 2) Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian

strateginya.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- 2) Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- 4) Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- 5) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 6) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

d. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Menurut Mahsun (2014) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi:

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya:
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan.
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
 - c) Jumlah infra struktur yang ada.
 - d) Jumlah waktu yang digunakan.
- 2) Indikator Proses (*Process*), misalnya:
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan.
 - a) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan jasa.

- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya:
 - a) Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya:
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan.
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai.
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya:
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indikator *Impact*, misalnya:
 - a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja) (Nadaek, 2013).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2013):

- a) Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
- b) Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.
- c) Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Dibawah ini ditunjukkan beberapa pengertian APBD, antara lain:

- 1) Pengertian APBD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah, “Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
- 2) Pengertian APBD menurut Mamesah (2021) pada orde baru adalah, “Rencana operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-setingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan

dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Definisi menurut Mamesah (2021) mengandung unsur:

- a) Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
 - b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
 - c) Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan, dan jenis proyek.
 - d) Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu April sampai dengan Maret dan Januari sampai dengan Desember.
- 3) Pengertian APBD menurut Halim (2017) adalah, “Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran”.

b. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Halim (2017), antara lain:

- 1) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- 2) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (*line item*) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam

APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- 3) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- 4) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan 3 unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- 5) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

c. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Fungsi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) menurut Mamesah (2021), antara lain:

- 1) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- 2) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- 3) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- 5) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.

2.1.4 Analisis Penilaian Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan.

Menurut Helfert (1982) dalam Mahsun (2014), “Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasinya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpun dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun sumber daya manusianya. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

- b) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini

adalah sebagai berikut: DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja.

Dengan melihat kinerja belanja, maka dapat dilihat kinerja APBD secara umum. Jika semua kinerja tersebut menunjukkan pencapaian angka yang sudah ditergetkan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja APBD adalah baik.

1) Efektivitas PAD

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (Mardiasmo, 2013). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Maka didalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui pengukuran efektivitas.

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mahsun, 2014). Rumus untuk mengukur kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan menggunakan ukuran efektivitas tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Realisasi Belanja Langsung Terhadap Anggaran Belanja	Kriteria Keserasian Belanja
< 60%	Tidak Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
91% - 100%	Efektif
> 100%	Sangat Efektif

Sumber: Kemenkeu.go.id

2) Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rumusan pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan anggaran belanja daerah. Secara umum, nilai efisiensi dalam dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Realisasi Belanja Langsung Terhadap Anggaran Belanja	Kriteria Keserasian Belanja
< 60%	Tidak Efisien
60% - 80%	Kurang Efisien
81% - 90%	Cukup Efisien
91% - 100%	Efisien
> 100%	Sangat Efisien

Sumber: Kemenkeu.go.id

3) Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal (Halim, 2017). Adapun rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

$$\text{Belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

Kemampuan suatu daerah dikatakan baik apabila total belanja pembangunan lebih besar dari total belanja rutin. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Keserasian Belanja Daerah

Realisasi Belanja Langsung Terhadap Anggaran Belanja	Kriteria Keserasian Belanja
0 – 20	Tidak Serasi
> 20 – 40	Kurang Serasi
> 40 – 60	Cukup Serasi
> 60 – 80	Serasi
> 80 – 100	Sangat Serasi

Sumber: Kemenkeu.go.id

4) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2014). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2017). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total PAD pada tahun } t}{\text{Total PAD pada tahun } t-1} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Penerimaan Pusat/ Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan dengan daerah terhadap sumber dana ekstem. Semakin tinggi rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (Halim, 2017).

Tabel 2.4 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai Rasio (%)	Kemandirian	Pola Hubungan
0 – 25	Sangat Rendah	Instruktif
25 – 50	Rendah	Konsultatif
50 – 75	Sedang	Partisipatif
75 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Kemenkeu.go.id

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Anggaran kinerja sektor publik sebelumnya sudah pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Rigel Nurul fatah (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Gunung Kidul	Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah	Hasil analisis kinerja keuangan pemerintah Gunung Kidul dilihat dari rasio efektivitas PAD sudah tergolong efektif, jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah maka kinerja keuangan pemerintah Gunung Kidul belum terbilang efisien. Kinerja pemerintahnya dilihat dari rasio pertumbuhan sudah cukup tumbuh positif. Dan dilihat dari rasio kemandirian daerah, pemerintah daerah Gunung Kidul terbilang masih sangat rendah.
2.	Mubin Fauzil (2017)	Analisis Kinerja Keuangan Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang	Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Malang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Malang	1. Kinerja DISPENDA dalam rangka meningkatkan PAD di kota Malang sudah baik 2. Pada rasio efektivitas menunjukkan peningkatan setiap tahunnya 3. Rasio kemandirian mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 15.05% artinya kemandirian PAD kota Malang tinggi. 4. Rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan secara positif 5. Rasio kontribusi PAD kota Malang 2010-2012 secara keseluruhan mengalami kenaikan
3.	Apri Diana Eka Ayu (2017)	Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 – 2015)	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan dan Kinerja Keuangan Daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek dilihat dari (1) Rasio kemandirian daerah sangat baik dalam menjalankan tugas – tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan, karena hasil rata – rata kemandiriannya sebesar 245,61%, (2) Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, karena hasil rata – rata efektivitasnya 99,20%, (3) Rasio Efisiensi daerah tergolong Sangat Efisien karena rata – rata besarnya rasio ini sebesar 1,04%, (4) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah rata-rata yaitu sebesar 85,33 dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 14,64%, (5) Rasio Pertumbuhan PAD, Belanja Operasi, belanja pertumbuhan, hasil rata – rata menunjukkan pertumbuhan positif yang artinya sangat baik.
4.	Desi, Linda dan Intan (2018)	Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD	Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi Belanja, rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan	Hasil analisis menunjukkan bahwa, pola hubungan kemandirian daerah masih belum cukup independen, tetapi tingkat efisiensi pengelolaan dinilai sudah efisien. Namun tingkat ketergantungan

		Sleman	Kinerja Keuangan Pemerintah	keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dianggap sangat tinggi.
5.	Sri Wahyuni (2022)	Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi Dan Rasio Efektivitas Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Berdasarkan Apbd Periode Tahun 2015-2020	Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Kinerja Pemerintah,	Dari hasil analisis, rasio kemandirian keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli tergolong pola hubungan instruktif (rendah sekali), dan rata-rata rasio efektivitas sebesar 84,02% tergolong tidak efektif. Kinerja keuangan pemerintah Kota Gunungsitoli tahun 2015 s/d 2020 dari aspek kemandirian menunjukkan pemerintah daerah masih belum mandiri, aspek pertumbuhan yang mengalami kenaikan dan penurunan yang cenderung fluktuatif, aspek keserasian dengan belanja operasi yang belum mendominasi dan belanja modal yang mendominasi, aspek efisiensi yang menunjukkan kinerja pemerintah masih belum efisien, dan aspek efektivitas masih tergolong tidak efektif.

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

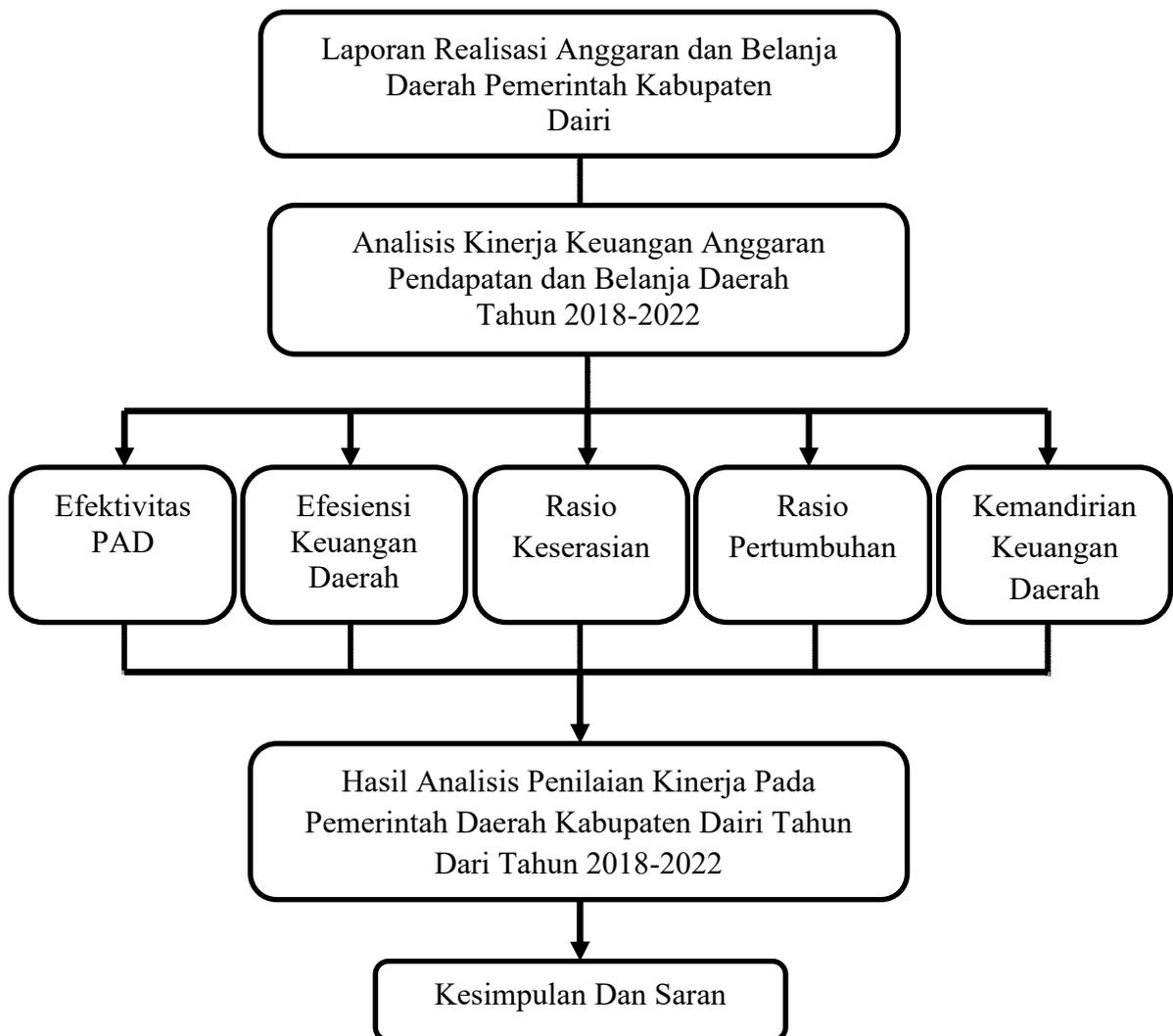
2.3 Kerangka Konseptual

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kinerja ataupun hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan anggaran dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Penilaian kinerja pemerintah sangat penting dilakukan oleh pemerintahan, karena dengan mengetahui kinerja keuangan maka dapat dijadikan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan, terutama melalui analisis rasio efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah. Karena sesuai dengan konsep anggaran mengindikasikan beban kerja, yakni semakin besar anggaran menunjukkan semakin besar pula beban kerja organisasi, begitu juga sebaliknya, program atau kegiatan merupakan *output* atau hasil kerja dan organisasi pemerintahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dan masyarakat

umum. Oleh karenanya pengalokasian anggaran sangat terkait dengan kinerja organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuannya.

Sesuai dengan pemaparan di atas, maka peneliti mencoba untuk menyusun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang dikumpulkan, dan tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi secara umum (Sugiyono, 2014).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yang artinya peneliti mendeskripsikan data yang diterima dan dikumpulkan dari Pemerintah Kabupaten Dairi untuk membuat suatu kesimpulan secara umum.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Sugiyono (2019) Lokasi penelitian adalah tempat di mana situasi sosial dipelajari. Misalnya di sekolah, dunia usaha, lembaga pemerintahan, jalan raya, perumahan, pasar, dan lain-lain.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 127, Kota Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, 22218.

3.2.2 Waktu Penelitian

Jadwal penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2023 dan akan selesai sesuai dengan waktunya. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun							
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Febru ari	Maret
		2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024
1	Pengajuan Judul	■							
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■				
3	Seminar Proposal					■			
4	Perbaikan/Acc Proposal						■		
5	Pengolahan Data						■		
6	Penyusunan Skripsi						■		
7	Bimbingan Skripsi							■	
8	Seminar Hasil							■	
9	Sidang Meja Hijau								■

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, dimana data yang diperoleh berupa data yang dapat dihitung dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dairi selama tahun 2018 sampai dengan 2022 tahun berjalan.

3.3.2 Sumber Data

Sugiyono (2014), Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa data dokumentasi serta arsip dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Selain itu sumber data diperoleh melalui internet, buku-buku, jurnal, artikel dan lainnya.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiyono (2014). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu mengenai pembahasan anggaran kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu usaha untuk melakukan pendektesian terhadap variabel satu yang berpengaruh terhadap variabel lain yang diamati dengan menggunakan pengukuran skala data interval dan skala data rasio yang dipilih peneliti untuk menentukan hubungan variabel dengan suatu gejala yang akan diobservasi (Sugiyono, 2019).

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Efektivitas PAD	Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. (Mahsun, 2016)	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$	Rasio
2	Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiesni belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. (Mahsun, 2016)	$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	Rasio
3	Rasio Keresasian	Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah	$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$	Rasio

		memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. (Halim, 2017)		
4	Rasio Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. (Mahmudi, 2014)	$\frac{\text{Total PAD } t}{\text{Total PAD } t-1}$	Rasio
5	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat. (Halim, 2017)	$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Penerimaan Pusat/Provinsi}}$	Rasio
6	Kinerja Pemerintah	Tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. (Kasmir, 2016)	Rasio Keuangan: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian	Rasio

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2019) merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti pergunakan adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri khas dibandingkan dengan teknik lainnya (Sugiyono, 2019). Observasi adalah aktivitas suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan-pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan studi penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melihat analisis efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan PAD dan rasiokemandirian keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dairi.

2) Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2019) adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, tulisan, gambar dalam bentuk laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian meninjaunya.

Dalam penelitian ini dokumentasi dapat dikaji melalui, rasio efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dairi selama tahun 2018 sampai dengan 2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang melakukan hal seperti pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan juga pemodelan data dengan memiliki tujuan untuk dapat menemukan informasi yang berguna dan untuk menginformasikan sebuah kesimpulan yang mendukung dalam melakukan pengambilannya (Sugiyono, 2019).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis pendapatan dan belanja. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti. Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan observasi terhadap penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dilihat dari APBD dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan.
- 2) Mengumpulkan data-data hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu Laporan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 3) Setelah semua data-data terkumpul secara baik maka penulis akan melakukan perhitungan dari masing-masing rasio keuangan, seperti:

a) Efektivitas PAD

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan apakah telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi pendapatan dengan total anggaran pendapatan daerah dikalikan seratus dalam bentuk persentase (Mahsun, 2014). Rumus untuk mengukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

b) Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Berikut adalah rumusnya:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2014)

c) Rasio Keceriasan

Rasio keceriasan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Rumus menghitung rasio keceriasan keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

d) Rasio Pertumbuhan

Tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Rumus menghitung rasio pertumbuhan PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total PAD pada tahun ke-n}}{\text{Total PAD pada tahun ke-0}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

e) Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan masyarakat.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Penerimaan Pusat/ Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Halim (2017)

- 4) Setelah melakukan analisis kinerja keuangan daerah dengan rasio keuangan, maka akan didapati hasil dari analisis. Selanjutnya penulis akan melakukan pengamatan lebih lanjut.

- 5) Kemudian peneliti menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan nilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
- 6) Hal terakhir adalah menentukan kesimpulan dan saran dari hasil temuan penelitian yang sudah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi

Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan kondisi alam berbukit dan jalan sempit terjal. Kabupaten Dairi mempunyai 15 kecamatan, 161 desa dan 8 kelurahan, diantara desa tersebut terdapat 96 desa yang tergolong tertinggal, letaknya jauh dari jangkauan fasilitas umum seperti media baca dan fasilitas umum dinas lainnya.

Kabupaten Dairi terletak di bagian barat daya Kabupaten Dairi dengan luas wilayah 191.625 Ha. Secara astronomis terbentang antara 98000' – 98030' BT dan 2015'-3' LU. Topologi tanahnya sangat variatif, berbukit dan bergelombang yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi NAD dan Kabupaten Karo

Sebelah Timur: Kabupaten Samosir,

Sebelah Selatan: Pak-pak Bharat,

Sebelah Barat: Kabupateen Aceh Selatan Provinsi NAD.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Dairi merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 700 hingga 1.250 m di atas permukaan laut. Iklim tropis pada ketinggian di bawah 500 m dpl, iklim subtropis pada daerah yang terletak pada ketinggian 400 s/d 1.360 m dpl, dan iklim dingin pada ketinggian 1.000 m. Penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Dairi bersifat heterogen, terdiri dari

suku Pak-Pak, Toba, Karo, Simalungun, Mandailing dan sebagian kecil suku Nias, Minangkabau, Tionghoa, Jawa, Aceh dan suku lainnya.

Mengingat kondisi alam dan topografi Kabupaten Dairi, sektor pertanian mempunyai potensi paling besar dalam menunjang perekonomian masyarakat. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah pertanian/hortikultura, budidaya ikan di tambak, rakit, tambak dan pengusaha peternakan/unggas. Angka tertinggi adalah rumah tangga pertanian yang memanfaatkan lahan sebesar 99,86%, dimana produksi padi dan tanaman penolong, usaha tani skala kecil dan berkebun merupakan sumber pendapatan utama masyarakat.

Kabupaten Dairi mempunyai banyak potensi yang dapat dimanfaatkan seperti potensi lahan, potensi sungai seperti Lae Sibellin dan Lau Renun, potensi pertambangan seperti pertambangan C dan pertambangan emas, potensi industri, potensi danau dan pariwisata.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas penunjang dalam bidang pemerintahan. bidang pengelolaan keuangan. dan manajemen aset. Fungsi Otoritas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

4.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi

Badan Kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi merupakan badan daerah yang mempunyai peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang memiliki potensi PAD yang cukup rendah karena wilayahnya yang tidak terlalu luas. Dengan sistem desentralisasi, Kabupaten Dairi harus mengelola seluruh operasional keuangan seefisien mungkin dan harus mampu menghadirkan inovasi bagi pemerintahannya agar lebih mandiri dalam pengelolaan dan meningkatkan efisiensi kinerja keuangan daerahnya.

Berikut ikhtisar APBD Pemerintahan Bupati Dairi selama lima tahun anggaran:

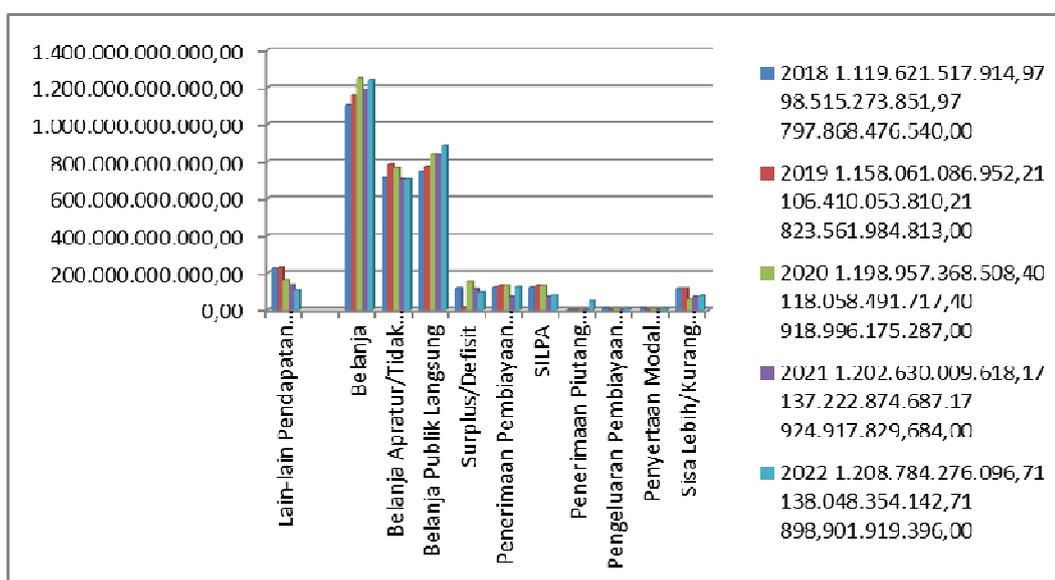
Tabel 4.1 Struktur APBD Pemerintah daerah Kabupaten Dairi

Struktur APBD	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	1.119.621.517.914,97	1.158.061.086.952,21	1.198.957.368508,40	1.202.630.009.618,17	1.208.784.276.096,71
PAD	98.515.273.851,97	106.410.053.810,21	118.058.491.717,40	137.222.874.687,17	138.048.354.142,71
Dana Perimbangan	797.868.476.540,00	823.561.984.813,00	918.996.175.287,00	924.917.829.684,00	898.901.919.396,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	223.237.767.523,00	228.098.048.329,00	161.902.701.504,00	137.489.305.247,00	106.834.002.558,00
Belanja	1.105.051.440.542,58	1.157.789.251.487,93	1.251.702.935.123,17	1.190.043.052.154,00	1.237.857.086.076,33
Belanja Apratur/Tidak Langsung	712.198.557.297,00	783.302.879.327,00	767.647.149.563,00	707.831.657.947,00	705.929.247.886,00
Belanja Publik Langsung	745.816.883.245,58	772.486.372.160,93	837.055.785.560,17	835.211.894.207,00	884.927.838.190,33
Surplus/Defisit	115.606.077.372,39	14.271.835.464,28	153.745.566.614,77	113.586.957.464,17	96.072.809.979,62
Penerimaan Pembiayaan Daerah	121.028.560.309,33	128.143.082.781,72	128.414.918.246,00	70.868.964.197,23	122.529.140.025,40

SILPA	121.025.678.209,33	128.134.637.681,72	128.414.918.246,00	70.868.964.197,23	83.226.140.025,40
Penerimaan Piutang Daerah	5.882.100,00	10.445.100,00	21.335.400,00	-	49.303.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.500.000.000,00	-	7.819.772.834,00	-	7.816.865.557,00
Penyertaan Modal Pendana	10.500.000.000,00	-	7.819.772.834,00	-	7.816.865.557,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	115.134.637.681,72	115.414.918.246,00	57.868.064.197,23	70.455.921.661,40	75.639.464.488,78

Sumber: BPKAD data diolah (2023)

Gambar 4.1 Struktur APBD Pemerintah daerah Kabupaten Dairi



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

4.1.3 Analisis Efektivitas PAD

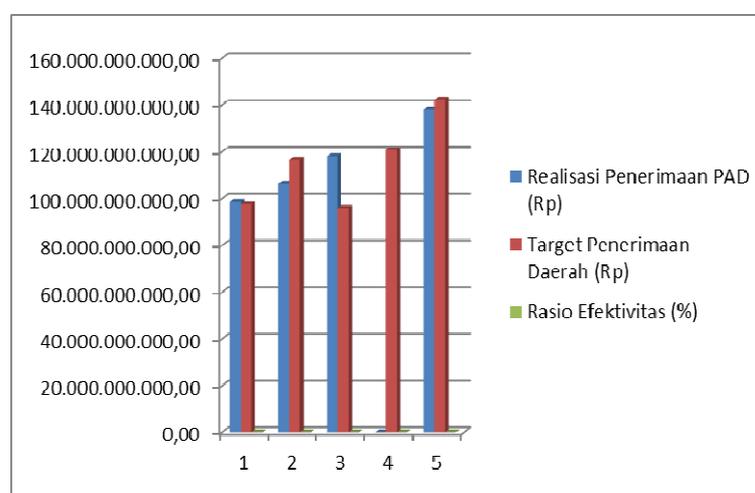
Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan Daerah (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kategori
2018	98.515.273.851,97	97.520.914.287,68	101%	Kurang Efektif
2019	106.410.053.810,21	116.519.037.265,60	90%	Tidak Efektif
2020	118.058.491.717,40	95.857.330.740,00	123%	Cukup Efektif
2021	137.222.874.687,17	120.868.964.197,23	113%	Kurang Efektif
2022	138.048.354.142,71	142.529.140.025,40	96%	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Gambar 4.2 Grafik Perhitungan Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.2 dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektivitas).

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas di atas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 tingkat rasio efektivitas yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 101%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan tidak efektif.

2. Tahun 2019 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 90%. Hal itu terlihat dengan target lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan cukup efektif.
3. Tahun 2020 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi 123%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan tidak efektif.
4. Tahun 2021 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 113%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan tidak efektif.
5. Tahun 2022 tingkat rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 96%. Hal itu ditunjukkan dengan realisasi lebih besar dibandingkan dengan target sehingga dapat dikatakan cukup efektif.

Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal, sebaiknya rasio efisiensi pendapatan daerah awal dibandingkan dengan rasio efisiensi pendapatan daerah awal yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan sebenarnya yang diterima. Efisiensi pengumpulan anggaran pemerintah daerah dianggap efektif apabila angka yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100 (seratus) persen. Semakin rendah rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

4.1.4 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi

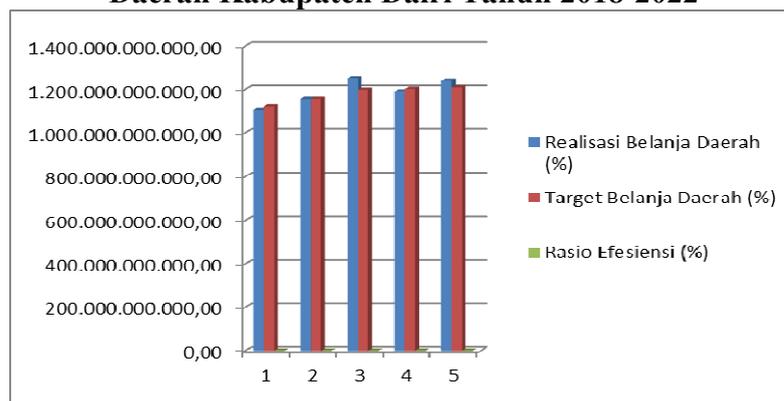
pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi disebut juga rasio perbandingan kerja yang berguna diperoleh dari hasil operasi perusahaan tersebut dalam mengelola aset-aset yang dimilikinya.

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (%)	Target Belanja Daerah (%)	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
2018	1.105.051.440.542,58	1.119.621.517.914,97	98%	Kurang Efisien
2019	1.157.789.251.487,93	1.158.061.086.952,21	99%	Kurang Efisien
2020	1.251.702.935.123,17	1.198.957.368.508,40	104%	Tidak Efisien
2021	1.190.043.052.154,00	1.202.630.009.618,17	98%	Kurang Efisien
2022	1.237.857.086.076,33	1.208.784.276.096,71	102%	Tidak Efisien

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Gambar 4.3 Grafik Perhitungan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Sesuai dengan hasil perhitungan dari tabel 4.3 maka perhitungan rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahun 2018 tingkat rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 98%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi belanja sehingga dapat dikatakan kurang efisien.

2. Tahun 2019 tingkat rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 99%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi, sehingga dapat dikatakan kurang efisien.
3. Tahun 2020 tingkat rasio efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 104%. Hasil tersebut menunjukkan target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan tidak efektif.
4. Tahun 2021 tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 98%. Hal itu membuktikan bahwa target belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan kurang efektif.
5. Tahun 2022 tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebesar 102%. Hal itu membuktikan bahwa target belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi lebih besar dibandingkan realisasi sehingga dapat dikatakan tidak efisien.

Artinya, dengan mengeluarkan dana yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat memberikan hasil yang optimal dan memberikan gambaran yang baik mengenai kinerjanya. Dengan tingkat efisiensi yang baik, tujuan seperti memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan pemborosan yang tidak perlu akan tercapai, meningkatkan kinerja suatu unit untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mencapai tujuan yang direncanakan akan dapat terwujud.

4.1.5 Analisis Rasio Keserasian

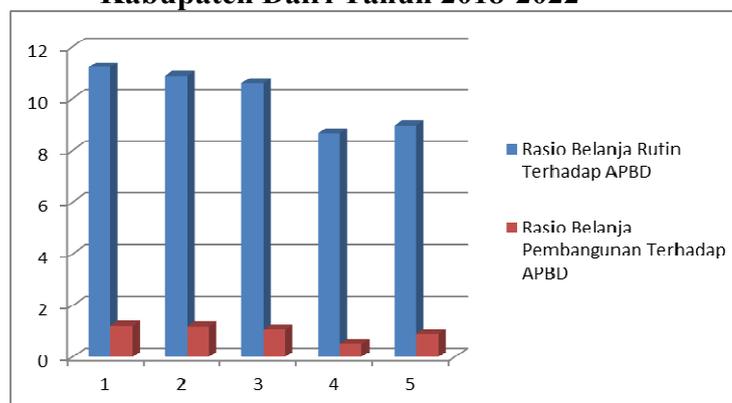
Rasio yang diselaraskan menggambarkan bagaimana suatu pemerintah daerah mengutamakan alokasi modal yang optimal untuk belanja operasional dan belanja modal (Halim, 2017).

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022

Tahun	Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD	Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD
2018	11,21%	1,22%
2019	10,88%	1,20%
2020	10,60%	1,08%
2021	8,67%	0,51%
2022	8,96%	0,88%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Gambar 4.4 Grafik Perhitungan Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Hasil perhitungan rasio keserasian pada Tabel 4.4 di atas menunjukkan bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi mengutamakan alokasi dana yang optimal untuk belanja rutin dan pembangunan. Secara teori, jika proporsi modal yang dialokasikan pada belanja rutin berarti proporsi belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana fisik dan prasarana ekonomi bagi masyarakat cenderung meningkat ke arah yang lebih rendah (Halim, 2017).

Hingga saat ini, belum ada referensi akurat mengenai perbandingan ideal antara kekambuhan dan perkembangan anggota tubuh serta APBD. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika kegiatan pembangunan dan perlunya investasi signifikan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi diprioritaskan untuk memenuhi belanja rutin sehingga rasio belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif lemah. Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan bidang pembangunan yang mempunyai *multiplier effect*, khususnya proses yang menunjukkan seberapa besar perubahan pendapatan nasional akibat perubahan total belanja. *Multiplier effect* bertujuan untuk menjelaskan dampak kenaikan atau penurunan total belanja di atas tingkat keseimbangan khususnya terhadap tingkat pendapatan nasional dan dampak langsungnya terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Rasio belanja rutin dibandingkan APBD tahun 2018 hingga 2022 cenderung menurun. Setelah itu, tingkat persentase rasio belanja pembangunan dibandingkan APBD juga mengalami keadaan serupa, yaitu tren menurun.

Artinya pemerintah daerah Kabupaten Dairi masih mendominasi pengeluaran untuk kebutuhan aparatur pemerintah daerah (belanja saat ini). Pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan reorientasi kegiatan pemerintah daerah terhadap belanja pembangunan, yang tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan pendapatan daerah dalam hal pembangunan daerah.

Kegiatan daerah adalah serangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembangunan dan pembangunan daerah serta merupakan suatu kesatuan pembangunan dengan menggunakan keterkaitan antar sektor yang membentuk struktur ruang daerah. Daerah sebagai wadah kegiatan perekonomian memegang peranan penting bagi dirinya dan daerah disekitarnya. Pengertian sistem kegiatan daerah dan pola perilaku manusia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan daerah, secara spesifik sistem kegiatan mempunyai hubungan yang

lebih kompleks dengan banyak sistem kegiatan lainnya, baik dengan individu, kelompok maupun dengan lembaga.

4.1.6 Analisis Rasio Pertumbuhan

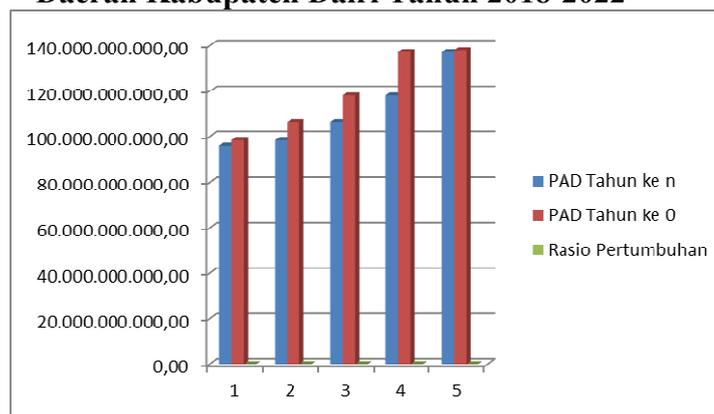
Tingkat pertumbuhan dapat mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari satu periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2014). Dengan mengetahui pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi yang perlu mendapat perhatian.

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022

Tahun	PAD Tahun ke n	PAD Tahun ke 0	Rasio Pertumbuhan
2017/2018	96.133.794.210,47	98.515.273.851,97	97,58%
2018/2019	98.515.273.851,97	106.410.053.810,21	92,58%
2019/2020	106.410.053.810,21	118.058.491.717,40	90,13%
2020/2021	118.058.491.717,40	137.222.874.687,17	86,03%
2021/2022	137.222.874.687,17	138.048.354.142,71	99,40%

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Gambar 4.5 Grafik Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Hasil perhitungan pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tahun 2017/2018 sebesar 97,58%, tahun 2018/2019 turun menjadi

92,58%, tahun 2019/2020 turun lagi menjadi 90,13%, kemudian pada tahun 2020/2021 turun lagi . menurun lagi menjadi 86,03% dan pada tahun 2021/2022 meningkat kembali menjadi 99,40%.

Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa kinerja pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi tidak terlalu positif karena mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada tahun 2022 akan mulai meningkat lagi.

Pertumbuhan suatu daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu merasionalisasikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk belanja rutin dan memanfaatkan pendapatan daerah secara efektif untuk sektor pembangunan, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan PAD.

Pemerintah daerah Kabupaten Dairi harus optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama diharapkan dari beberapa sektor dominan seperti perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan serta perdagangan dan jasa. Wilayah ini mungkin menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal ini merupakan komitmen yang sangat kuat dari pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan investasi yang semakin kondusif dan terbuka guna menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Dairi.

4.1.7 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

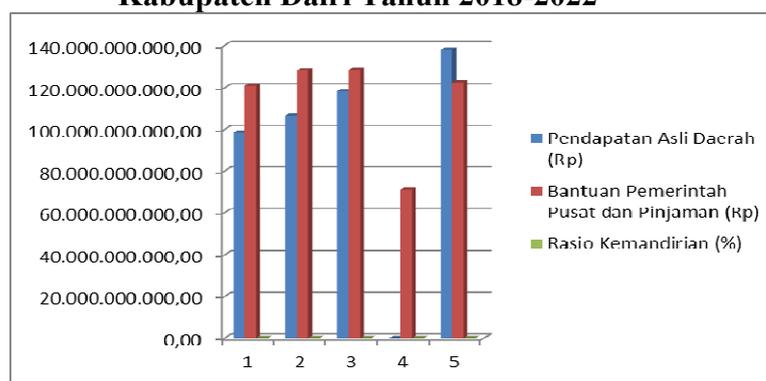
Daerah mewakili kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang dibutuhkannya. Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap modal eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan pentingnya pendapatan awal daerah (PAD) dibandingkan pendapatan daerah dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman dari luar.

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Kategori
2018	98.515.273.851,97	121.028.560.309,33	81%	Delegatif
2019	106.410.053.810,21	128.143.082.781,72	83%	Delegatif
2020	118.058.491.717,40	128.414.918.246,00	92%	Delegatif
2021	137.222.874.687,17	70.868.964.197,23	93%	Delegatif
2022	138.048.354.142,71	122.529.140.025,40	112%	Delegatif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Gambar 4.6 Grafik Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018-2022



Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2023)

Dari hasil di atas, dapat dijelaskan hasil perhitungan rasio kemandirian sebagai berikut:

1. Tahun 2018 tingkat rasio kemandirian berada di angka 81% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 98.515.273.851,97 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 121.028.560.309,33. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2018 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
2. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 83% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 106.410.053.810,21 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 128.143.082.781,72. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2019 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
3. Tahun 2020 tingkat rasio kemandirian mengalami peningkatan kembali menjadi 92% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 118.058.491.717,40 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman Rp. 128.414.918.246,00. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2020 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
4. Tahun 2021 tingkat rasio kemandirian mengalami kenaikan menjadi 93% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 137.222.874.687,17 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 70.868.964.197,23. Hasil perhitungan rasio kemandirian di tahun 2021 terbilang cukup baik dengan pola hubungan delegatif.
5. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 112% dengan jumlah PAD sebesar Rp. 138.048.354.142,71 dan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman sebesar Rp. 122.529.140.025,40. Hasil perhitungan rasio

kemandirian di tahun 2022 terbilang sangat baik dengan pola hubungan delegatif.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, baik pembangunan juga pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tingkat kemandirian juga tercermin tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang tinggi itu adalah komponen pendapatan dari daerah. Semakin tinggi tarifnya semakin besar kemandiriannya partisipasi masyarakat berkontribusi meningkatkan pendapatan awal daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi.

4.2 Pembahasan

Pembahasan merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Bagian inilah yang memuat uraian pokok permasalahan yang akan Anda bahas. Pembahasannya harus konsisten dengan konteks, penyajian masalah, dan tujuan artikel. Bagian pembahasan mempunyai fungsi menjelaskan tujuan, kelebihan, metode, kerangka teori dan merumuskan masalah, disertai dengan data yang diperoleh.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba membahas lebih lanjut terkait penilaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Dairi yang dilihat dari rasio efektivitas PAD, efisiensi keuangan daerah, keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut:

1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efisiensi PAD Kabupaten Dairi mengalami tren tidak efektif pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan persentase rasio efektivitas yang lebih tinggi dari 100%. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan sebenarnya yang diterima. Efisiensi pengumpulan anggaran pemerintah daerah dianggap efektif apabila angka yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100 (seratus) persen.

Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah suatu daerah dalam mencapai realisasi pendapatan daerahnya, yang kemudian dibagi dengan anggaran yang ditentukan sesuai dengan potensi daerah yang sebenarnya.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai organisasi. Efektivitas dapat diukur dari keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka dapat dikatakan organisasi tersebut beroperasi secara efisien.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rigel (2017) bahwa kinerja keuangan Wilayah Gunung Kidul jika dilihat dari rasio efektivitas adalah efektif. Hal ini terbukti tidak sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum efektif dalam menjalankan setiap fungsinya pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil analisis tingkat efisiensi PAD Kabupaten Dairi tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan hasil yang jauh dari optimal dan tidak efisien. Hal ini menegaskan tidak efisiennya pengumpulan PAD oleh pemerintah daerah ketika rata-rata di atas 100 dalam beberapa tahun terakhir.

Rasio efisiensi PAD menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan dengan pendapatan sebenarnya yang diterima. Efisiensi operasional pemerintah daerah dalam pengumpulan anggaran dan pelaksanaan pendapatan. Efisiensi keuangan suatu pemerintah daerah dalam hal pendapatan anggaran dianggap efektif apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%. Semakin rendah rasio efisiensi keuangan daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus menghitung dengan cermat berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang dikumpulkannya untuk mengetahui apakah kegiatan pengumpulannya efisien atau tidak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rigel (2017) yang menunjukkan bahwa penilaian kinerja pemerintah Wilayah Gunung Kidul terbilang sudah efisien. Pengamatan tersebut nampaknya tidak sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi ditinjau dari rasio efisiensi tidak efektif pada periode 2018-2022.

3. Rasio Keserasian

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa rasio belanja rutin dibandingkan APBD pada tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan.

Setelah itu, tingkat persentase rasio belanja pembangunan dibandingkan APBD juga mengalami keadaan serupa, yaitu tren menurun.

Pemerintah daerah Kabupaten Dairi masih dominan dalam belanja kebutuhan aparatur pemerintah daerah (belanja saat ini). Pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan reorientasi kegiatan pemerintah daerah terhadap belanja pembangunan, yang tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan pendapatan daerah dalam hal pembangunan daerah.

Rasio yang diselaraskan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah secara optimal memprioritaskan alokasi modal untuk belanja saat ini dan pembangunan. Semakin tinggi proporsi modal yang dialokasikan pada belanja rutin, maka semakin rendah proporsi belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat.

Belanja operasional merupakan perbandingan antara total belanja operasional dengan total belanja daerah. Rasio ini memberikan informasi kepada pembaca laporan mengenai proporsi belanja daerah yang dialokasikan terhadap belanja operasional. Beban operasional adalah beban yang manfaatnya dikeluarkan selama tahun buku, oleh karena itu bersifat jangka pendek dan dalam beberapa hal bersifat lancar dan berulang.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Kelfani (2019) yang mengemukakan bahwa rasio harmonisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk biaya operasional daerah. Hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten

Dairi pada periode 2018-2022 belum mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah dan mendominasi belanja aparatur pemerintah.

4. Rasio Pertumbuhan

Hasil analisis menunjukkan penilaian kinerja pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi kurang baik karena mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada tahun 2022 akan mulai meningkat lagi.

Laju pertumbuhan mengukur tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari satu periode ke periode berikutnya, baik dari sumber pendapatan maupun belanja. Laju pertumbuhan menunjukkan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan suatu daerah, maka semakin besar pula keberhasilan yang dicapai setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mubin (2017) bahwa kinerja keuangan daerah DISPENDA Kota Malang mempunyai tingkat pertumbuhan yang baik, begitu pula dengan hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata hasil pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi mempunyai tingkat pertumbuhan yang positif. tingkat pada periode 2018-2022.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dairi dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan amanah pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih kurang. Hal ini membuktikan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dairi belum cukup mandiri. Terlihat dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan namun tingkat dukungan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan pendapatan awal daerah kabupaten-kabupaten di daerah.

Angka kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan utama daerah. Semakin banyak pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat perlindungan sosialnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Apri (2017) bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Trenggalek dilihat dari rasio kemandirian daerah sangat baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hal ini berbanding lurus dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sangat baik pada tahun 2018 hingga tahun 2022.

6. Faktor-faktor yang Meningkatkan Nilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama antara lain pendapatan daerah, belanja daerah, keuangan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi daerah. Berikut penjabarannya:

- a. Departemen Pajak Daerah bertugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pemungutan pajak daerah dan tugas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif,

DPRD. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

- c. Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah mengelola keuangan daerah secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemudahan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan departemen terpenting bagi instansi pemerintah dan memegang peranan penting dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi pemerintah.
- e. Penerapan kebijakan makro ekonomi bertujuan untuk menstabilkan harga komoditas dan lapangan kerja. Pada akhirnya, situasi ini akan membawa dampak positif bagi suatu negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir berdasarkan uraian artikel yang telah dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan keputusan yang diperoleh dari pemikiran induktif atau deduktif.

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti mencoba untuk mengemukakan simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi kurang efektif dalam menjalankan amanahnya. Hal ini menunjukkan penilaian terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum mencapai tingkat yang efektif.
2. Rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dairi masih belum efektif dan dapat dikatakan tingkat pencapaian nilai kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi belum optimal dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya modal. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian PAD yang berfluktuasi setiap tahunnya.
3. Rasio keserasian Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih belum optimal dalam memprioritaskan alokasi dana belanja rutin dan belanja pembangunan. Hal ini terlihat dari belanja aparatur pemerintah yang mendominasi belanja pembangunan daerah.
4. Laju pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum menunjukkan status yang cukup baik dan positif. Hal ini menunjukkan nilai kinerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi masih belum berjalan maksimal.

5. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Dairi baik dan cukup mandiri dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan amanah pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.
6. Faktor-faktor lain yang dikatakan dapat mempengaruhi nilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi adalah pendapatan daerah, belanja daerah, keuangan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

1. Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hendaknya selalu memantau tingkat efektivitas pencapaian anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hendaknya selalu mengecek efisiensi daerah untuk mengendalikan besarnya biaya yang ditanggung pemerintah.
3. Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hendaknya selalu mengupayakan keselarasan dalam kegiatan belanja pemerintah, untuk mengetahui apakah arah dan alokasi modal sudah tepat atau belum.
4. Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hendaknya menilai tingkat pertumbuhan daerah berguna dalam menentukan apakah kinerja keuangan APBD positif atau negatif.

5. Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hendaknya melakukan evaluasi terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Dairi untuk lebih memantapkan kemandirian daerah agar tetap representatif. Dengan begitu, Kabupaten Dairi benar-benar bisa dikatakan mandiri tanpa adanya campur tangan pemerintah.
6. Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hendaknya mempertimbangkan lebih dalam lagi terkait faktor yang dapat meningkatkan nilai kinerja seperti pendapatan daerah, belanja daerah, keuangan daerah, sumber daya manusia, dan kondisi makro ekonomi daerah. Jika faktor-faktor tersebut dapat di optimalkan, maka nilai kinerja akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al. 2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Abdul, Halim. dan Muhammad, Iqbal. 2017. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN.
- Abdul, Halim. dan Syam, Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Atmawati, Lilis. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang. (Publikasi).
- Ariani, Rahayu. 2016. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Syariah Paper Accounting FEB UMS* ISSN 2460-0784.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Diana, Apri. 2017. Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Dan Aset Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 – 2015). Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri. (Publikasi).
- Fahmi, M. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fauzil, Mubin. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. *Jurnal Ekonomika*.
- Hutagaol, Kristina. 2021. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Eprins IPDN*.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Indra, Annafi. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Apbd Kabupaten/Kota Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Jurnal JRAK*. Vol.6 No.2.
- Kaho, Josef Riwu. 2018. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Karamoy. 2013. Analisis Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota tomohon tahun anggaran 2011-2013. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Lubis, Hafni Nurlia. 2017. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011–2013. *KITABAH: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2017*.
- Mahsun, M. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. 2013. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Mulyadi dan Jhoni Setiawan. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Nordiawan. 2017. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. Salemba Empat.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.

- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Sari. 2020. Analisis Penerapan Sistem prosedur dan Pengeluaran Kas Menggunakan Uang Persediaan Pada Pemerintah Kota Binjai. Medan: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Suliyanto. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi.
- Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. 2017. Analisis Rasio Laporan Keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Sebagai Tolok Ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. 1–16.
- Wahyuni, Nanik. 2014. Analisis Rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota malang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI: Malang.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.